



## **Navigasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap ASEAN Community Era Pemerintahan Jokowi 2014-2019**

Jelita Eka Azzahra

Universitas Padjadjaran, Indonesia; jelita21001@mail.unpad.ac.id

Muhammad Zulfan Abdillah

Universitas Padjadjaran, Indonesia; muhammad21072@mail.unpad.ac.id

| Dikirim: 17-01-2025 | Diterima: 30-01-2025 | Dipublikasikan: 31-01-2025 |

### **Keywords**

Indonesia  
Foreign  
Policy,  
ASEAN  
Community,  
APSC, AEC,  
ASCC

### **ABSTRACT**

*The successful accelerated integration of ASEAN as one community drives a prominent impact on ASEAN member states. Its success in maintaining security and political stability, economic development, and good practice in a social culture heavily depends on the actions and contributions of ASEAN members. Positioned to be a prominent figure since the ASEAN establishment, Indonesia's involvement in the practice of the ASEAN Community became one of the most influential. Because the foreign policy reflects the role of Indonesia towards AC, this research aimed to seek an understanding of Indonesia's foreign policy navigation under Jokowi's first reign, which tends to be more inward-looking. By employing the qualitative method, this research collected and analyzed data from secondary resources, including formal reports, official statements, journals, and Internet sources. This research shows that Indonesia's foreign policy navigation under Jokowi's first reign is still relevant with APSC, AEC, and ASCC. That led to commitments and plans for taking equitable action to respond to a series of issues through Indonesia's participation and contribution to those pillars.*

### **Kata Kunci**

Kebijakan  
Luar Negeri  
Indonesia,  
Komunitas  
ASEAN,  
APSC, AEC,  
ASCC

### **ABSTRAK**

Keberhasilan percepatan integrasi ASEAN sebagai satu komunitas (*ASEAN Community – AC*) akan memberikan dampak yang besar bagi negara-negara anggotanya. Keberhasilan AC dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik, pembangunan ekonomi dan praktik baik di bidang sosial budaya sangat bergantung pada tindakan dan kontribusi dari negara-negara anggota. Sebagai negara perintis dan dituakan dalam ASEAN, Indonesia sangat berpengaruh dalam upaya membentuk AC. Peran Indonesia tercermin dari kerja kebijakan luar negerinya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman tentang navigasi kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama yang bercirikan *inward-looking*. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Riset ini menemukan kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo masih berpedoman pada tiga pilar AC, yaitu APSC, AEC dan ASCC yang bermuara pada komitmen dan rencana pengambilan tindakan yang berkeadilan dalam merespon serangkaian permasalahan yang muncul dalam AC.

## **PENDAHULUAN**

Kawasan Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang memiliki rekam jejak kerja sama antarnegara dalam bentuk organisasi regional yang disebut *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Organisasi ini sendiri dianggap menjadi contoh utama keberhasilan integrasi kawasan dari negara-negara berkembang (Abdurofiq et al., 2024). Pernyataan tersebut didukung juga oleh ASEAN menerapkan konsensus maupun pendekatan yang dapat mencapai implementasi efektif terkait penanganan sejumlah permasalahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan tetap memegang teguh prinsip kolaborasi, saling menghormati, serta *non-intervention* urusan dalam negeri setiap anggotanya (Cahya et al., 2023). ASEAN dibentuk melalui proses panjang dalam mempertahankan eksistensinya di kancah regional maupun global. Sedari awal pendirian organisasi pada 1967 di Bangkok, ASEAN telah menghadapi berbagai tantangan dalam pengukuhan integrasi intra-regional, di antaranya isu terorisme, krisis finansial dan energi global, konflik antar negara anggota (Artnr, 2017).

Penguatan hubungan negara anggota ASEAN terlihat pasca ke-10 ketika pemimpin ASEAN menandatangani kesepakatan Bali Concord II dalam KTT ASEAN IX untuk mewujudkan pembentukan *ASEAN Community*. *ASEAN Community* 2015 terdiri dari tiga pilar: *ASEAN Political-Security Community* (APSC), *Economic Community* (AEC), dan *Socio-Cultural Community* (ASCC). Ini merupakan pencapaian penting dalam mewujudkan visi ASEAN sebagai satu komunitas dengan identitas dan tujuan bersama. *ASEAN Community* menegaskan tujuan para pendiri ASEAN untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya terlihat jelas dalam kemajuan ekonomi dan budaya kawasan, kemajuan sosial, perdamaian dan keamanan kawasan, kolaborasi, saling mendukung dalam pelatihan dan penelitian, peningkatan standar hidup, promosi studi Asia Tenggara, dan kerja sama dengan organisasi regional dan internasional (Zulkarnain, 2017)

Tahapan transformasi ASEAN yang semula hanya perkumpulan negara dan berorganisasi menjadi wujud kesatuan masyarakat regional secara terintegrasi melalui penetapan kebijakan bersama dari seluruh anggotanya dengan adanya *ASEAN Community*. Sedari awal pendirian ASEAN, Indonesia telah menampilkan diri sebagai negara yang dapat berperan secara aktif dalam lingkup regional, ditujukan tidak sebatas menjadi negara pendiri ASEAN semata; namun kepemimpinan Indonesia untuk ASEAN patut diperhitungkan sebagaimana penggambaran dari Presiden Soeharto yaitu Indonesia merupakan “*constructive neighbor*”. Dalam ASEAN, kepemimpinan Indonesia ditujukan dengan menjadi mediator, agensi serta optimasi aktivitas diplomasi regional secara extra (Roberts & Widyaningsih, 2015). Langkah tersebut diambil mengingat Indonesia menjadikan ASEAN sebagai pusat utama dalam kebijakan luar negerinya. Sedari pendirian ASEAN, Indonesia menjadikan ASEAN sebagai *cornerstone* (landasan) kebijakan luar negerinya (Andis Rafaldhanis, 2023). Wujud nyata peran Indonesia bagi ASEAN teraktualisasi dari berbagai sikap dan tindakan Indonesia dalam mendukung implementasi sejumlah kebijakan ASEAN.

Di lain sisi, kebijakan luar negeri Indonesia bersifat dinamis dengan tetap berpedoman pada prinsip “Bebas” dan “Aktif”. Pemimpin negara menjadi faktor utama yang mempengaruhi dinamika pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Begitupun dengan Indonesia. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan luar negeri secara eksplisit ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan peran Indonesia di kancah internasional. Dengan menekankan prinsip, “*thousand of friend, zero enemies*” SBY memperjelas arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat *outward-looking* berdasarkan nilai demokrasi dengan menjunjung kepercayaan diri, moderat dan toleransi (Andika, 2016). Keyakinan ini semakin kuat terutama dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia yang berfokus pada ASEAN. Sebagaimana pernyataan resmi SBY pada ASEAN Summit ke-19 supaya negara-negara anggota mengambil peranan nyata dalam penguatan tiga pilar ASEAN Community, menunjukkan tingkat perhatian pemerintahan SBY terhadap urusan luar negerinya dalam hal ini merujuk *ASEAN Community*.

Sementara itu, pergantian era kepemimpinan oleh Joko Widodo, langkah kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan berbeda yang cenderung bersifat *inward looking*. Artinya, kebijakan luar negeri membangun kekuatan dari dalam untuk membina pembangunan nasional, sebelum turut berpartisipasi pada tatanan dunia internasional. Gagasan yang dikenal sebagai “*pro-people diplomacy*” ini berarti pemerintahan Presiden Jokowi berusaha untuk lebih berbenah dan fokus mengurus urusan dalam negeri untuk memperkuat negeri sebelum unjuk diri ke luar. Hal ini kemudian juga berpengaruh pada posisi dan peran Indonesia di ASEAN (Mahadana, 2023). Oleh karena itu, tulisan ini menelaah peran nyata Indonesia bagi ASEAN melalui aplikasi maupun aksi Indonesia dalam merealisasikan ketiga pilar ASEAN Community.

Meninjau signifikansi peran dan kontribusi Indonesia secara lintas era kepemimpinan sebelum Jokowi, Indonesia menjadi salah diantara aktor utama dan penting bagi ASEAN. Implementasi dan keberlangsungan dari ASEAN Community juga dipengaruhi oleh peran Indonesia melihat kapabilitas ekonomi, militer dan sosial-budaya yang mendukung. Berdasarkan kajian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap tiga pilar ASEAN Community. Selain itu, studi mendalam dalam memahami arah kebijakan luar negeri Indonesia pada masa transisi kepemimpinan ditengah pembentukan ASEAN Community juga perlu diperluas. Dengan demikian, riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana navigasi kebijakan luar negeri Indonesia pada periode pertama pemerintahan Jokowi terhadap ASEAN Community.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat dijelaskan berdasarkan hubungan internasional yang dijalin negara tersebut dimana menjelaskan perilaku dan sikap di dalam sistem internasional. Konteks tersebut pada dasarnya bermuara terhadap bagaimana suatu negara menanggapi persoalan terjadi dalam lingkup internasional dengan berpegang pada orientasi, nilai juga konsiderasi atas kontribusi dapat diberikan pada pemecahan persoalan tersebut. Pemahaman tersebut selaras dengan pemikiran Waltz (1996) yang menyatakan, “*states behave in international system in different ways based on internal composition*” dalam hal ini Waltz menekankan unsur kepentingan maupun tujuan dari suatu negara ketika menetapkan maupun mengimplementasikan kebijakan luar negerinya.

Beberapa ahli turut mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijakan luar negeri. Hermann memandang kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara. Sementara itu, Russett & Starr mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai panduan untuk tindakan yang diambil di luar batas negara untuk memajukan tujuan negara (Tayfur, 1994). Dengan menggabungkan pandangan Hermann dengan kedua tokoh tersebut Gerner menegaskan definisi kebijakan luar negeri yakni niat, pernyataan, dan tindakan suatu aktor yang diarahkan ke dunia luar, dengan tanggapan aktor lain terhadap niat, pernyataan, dan tindakan tersebut (Gerner, 2007).

Terkait perumusan kebijakan luar negeri, Allison berpendapat terdapat tiga paradigma untuk menganalisis hal ini. Model pertama adalah model aktor rasional, dengan asumsi negara adalah aktor terpadu dan rasional, sehingga pengambilan keputusan dianggap sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Model ini memandang pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi, konsekuensi, dan jalur alternatif secara rasional, untuk kemudian mengambil keputusan yang menghasilkan keuntungan tertinggi serta sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. Model berikutnya adalah model proses organisasi, yang menjelaskan pengambilan keputusan berangkat dari serangkaian tahapan dan pengorganisasian yang selaras dengan *standard operating procedure/SOP*. Model terakhir adalah model politik birokrasi, yang melihat pengambilan keputusan sebagai proses yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan secara bersama, yang juga mempengaruhi perumusan dan penerapan kebijakan tersebut (Allison, 1969).

Di sisi lain, orientasi internal tidak domain faktor kebijakan luar negeri suatu negara, situasi eksternal yang terjadi dalam sistem pada prinsipnya dapat mendorong negara tersebut mengambil tindakan maupun berstrategi dalam pelaksanaannya. Selaras dengan pandangan tersebut, dalam menetapkan kebijakan luar negeri, suatu negara tentu memiliki tujuan ketika menyangkut dengan urusan eksternal negaranya. Pemahaman ini didukung pernyataan K. J. Holsti (1970) mengenai komponen orientasi, tujuan, peranan serta implementasi tindakan negara dalam merespon lingkungan eksternal secara sadar. Komponen tersebut bertautan satu sama lain dimana konteks orientasi dan tujuan menjelaskan komitmen juga posisi utama negara saat menghadapi pengaruh politik internasional dengan tujuan mendasar yakni pemecahan permasalahan global. Sikap dari negara selanjutnya menanggapi konteks persoalan relevan dalam lingkup eksternal dituangkan melalui aksi nyata dipahami sebagai bentuk kebijakan. Penilaian terhadap strategi maupun kebijakan negara pada konteks tersebut merefleksikan wujud implementasi kebijakan (Holsti, 1983).

Selain itu, kebijakan luar negeri menurut Rosenau (1976) merupakan sebuah strategi atau tindakan yang dilakukan oleh pembuat keputusan dalam suatu negara untuk menyikapi negara atau entitas politik global lainnya untuk mencapai tujuan negara tersebut atau kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri digunakan oleh suatu negara untuk menangani dan mendapatkan manfaat dari hubungan dengan negara lainnya, tercermin melalui sikap dan tindakan yang diambil dalam menghadapi tantangan dan peluang dari lingkungan internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga digunakan menjadi alat bagi sebuah negara untuk dapat bertahan dalam politik global yang dinamis. Kemudian, Rosenau mengidentifikasi tiga komponen pola kebijakan luar negeri yang ditetapkan negara.

*Foreign policy as a cluster of orientation.* Orientasi yang dimaksud merujuk pada pandangan maupun nilai yang dipegang sebagai input internal berdasarkan pengalaman sejarah maupun kondisi strategis sehingga menentukan posisi negara dalam jalinan hubungan dengan lingkungan eksternalnya, dalam hal ini diinterpretasikan sebagai kebijakan luar negeri melalui arah kebijakannya. Karena itu, komponen ini menuntut pembuatan keputusan dan kebijakan yang selaras.

*Foreign policy as as a set of commitments to and plan for action.* Dalam komponen ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dalam membina dan mempertahankan kondisi lingkungan eksternal secara konsisten terhadap orientasi kebijakan luar negeri. Secara spesifik, komponen menjadi instrumen awal untuk mengambil langkah strategis dalam menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri.

*Foreign policy as a form of behaviour.* Komponen ini menandakan tingkat akhir dan empiris dari kebijakan luar negeri berupa berbagai aksi nyata, peranan maupun kontribusi ditetapkan pembuat kebijakan sehubungan dengan kondisi eksternalnya.

Konsep kebijakan luar negeri Rosenau diyakini penulis mempunyai relevansi dalam melihat dinamika pergerakan dari para pembuat kebijakan. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri Rosenau dengan tiga komponen utama sebagai dasar analisis

## **METODE RISET**

Untuk menjawab pertanyaan riset, penulis mengaplikasikan metode riset kualitatif dari Lamont (2015) yakni implementasi riset melalui pengumpulan data berbentuk lisan dan tulisan dan teknik analisis data non-numerik yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif dari pergerakan dunia dimana mengharuskan peneliti untuk berfokus kepada makna dan proses terjadi dalam politik internasional. Tujuan tersebut dicapai dengan studi terhadap peristiwa, fenomena, kawasan, negara, organisasi atau individu tertentu.

Dalam menyusun riset, data diperoleh melalui sumber data sekunder yang memiliki relevansi erat terhadap topik bahasan termasuk laporan dan dokumen resmi, studi kepustakaan, berita dan sejenisnya Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kerangka teori

sebagaimana dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya untuk melihat praktik dan memberikan interpretasi dari realitas temuan guna penarikan kesimpulan riset. Data dikumpulkan dan dipilah dengan seksama dalam mengungkap dinamika objek riset *ASEAN Community* yang kompleks dalam menjelaskan kondisi masa kini dari kawasan Asia Tenggara dan ASEAN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika dan Kompleksitas Perkembangan *ASEAN Community*

Keberhasilan negara anggota ASEAN dalam mendorong akselerasi integrasi Asia Tenggara melalui pendirian dan penetapan ASEAN Community pada tahun 2015 menjadi batu loncatan bagi masa depan ASEAN. Keberadaan ASEAN Community semakin memperkuat kerja sama antarnegara anggota dan mengurangi hambatan akibat perbedaan dalam sistem politik, ekonomi, budaya, dan agama (Velasco, 2023). Perbedaan tidak lagi dilihat sebagai tantangan maupun ancaman bagi integrasi regional. Namun, justru meningkatkan upaya juga langkah bersama dalam menangani berbagai permasalahan terjadi dengan menjembatani kesenjangan melalui optimasi tindakan kolektif dan komunikatif dari kepentingan regional. Walaupun ASEAN menghadapi kendala dalam kapasitas institusi dan mekanisme kerja berbasis non-intervensi, tiga pilar utamanya tetap menjadi dasar dalam memperkuat integrasi kawasan.

Perkembangan dari ASEAN Community dapat dilihat dari berbagai isu yang disuarakan dan menjadi perhatian negara-negara anggota dalam menanggapi pemetaan pilar AC. Berdasarkan riset yang dilakukan Velasco (2023) terkait implementasi dan prioritas dari setiap *Joint Communiqués* ASEAN menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian dan diskusi domain dari negara anggota sebagai kesatuan komunitas. Dari dimensi politik dan keamanan, APSC mencakup sejumlah isu yang berkesinambungan dibahas dalam diskusi dan pernyataan ASEAN diantaranya perihal Perjanjian Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama, Penanganan Kejahatan transnasional terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, Persoalan Laut Cina Selatan, Kerja sama pertahanan dan keamanan, Demokrasi dan HAM serta perjanjian persahabatan, dan lainnya.

Dari dimensi ekonomi, AEC memprioritaskan sejumlah isu yakni cetak biru ekonomi ASEAN, kerja sama energi, pariwisata, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan ketahanan pangan. Komponen yang disebutkan tersebut selanjutnya ditujukan guna merealisasikan kerangka kerja integrasi ekonomi, pasar bebas dan investasi berkelanjutan bagi negara anggota. Manfaat dari adanya AEC diharapkan dapat dioptimalkan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan modal dan mendorong UMKM juga sektor usaha, memaksimalkan upaya penyediaan dari rakyatnya (The Habibie Center, 2016).

Dari dimensi sosial-budaya, terdapat lima komponen yang menjadi perhatian lingkup ASCC yakni soal penanggulangan bencana, lingkungan hidup perubahan iklim, pemuda dan tenaga kerja. Melalui pemetaan ranah isu ASCC, mekanisme strategis dapat disusun seperti pembuatan ASEAN Centre for Biodiversity, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang menangani persoalan polusi, ASEAN Action Plan on Joint Response to Climate Change untuk mengkomunikasikan berbagai langkah preventif dan proaktif dari dampak perubahan iklim di Asia Tenggara, ASEAN Ministerial Meeting on Youth menekankan tanggung jawab pembangunan kapasitas pemuda-pemudi ASEAN, ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan standarisasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih kuat dan baik di antara negara-negara anggota ASEAN (The Habibie Center, 2016).

Sejumlah isu yang dijelaskan diatas baik dalam ranah APSC, AEC maupun ASCC yang menjadi perhatian dalam pertemuan perwakilan negara anggota hingga *output* berupa perjanjian yang menjadi pedoman implementasi dalam menyelaraskan kepentingan nasional maupun regional. Upaya ini berikutnya diarahkan untuk mempertahankan sentralitas ASEAN dan relevansi organisasi regional

tersebut dalam berperan di kancah global sebagai representatif integrasi kawasan Asia Tenggara yang stabil dan aman dari berbagai ancaman. Tingkat stabilitas regional dalam mengelola penyelesaian konflik dari negara-negara anggota, mengakomodir disparitas politik dan kultur masyarakat untuk tetap berperilaku secara harmonis hingga capaian dari optimasi pemanfaatan aktivitas ekonomi di kawasan diyakini merupakan pencapaian terbesar dalam mendefinisikan sentralitas ASEAN di mata internasional. Realisasi aspirasi tersebut dapat terwujud melalui peranan dan kontribusi negara anggota secara kooperatif dalam mengimplementasikan arsitektur regional ASEAN dengan inklusif secara bersama sehingga dapat menyoal target-target yang ditetapkan.

### **Navigasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk ASEAN Community**

#### **As a Cluster of Orientation: Pandangan Indonesia terhadap ASEAN Community**

Pada analisis kebijakan luar negeri yang menjelaskan bagaimana negara tersebut berhubungan didasari oleh *cluster of orientation*, model gagasan, prinsip maupun pedoman Indonesia dalam merespon kondisi eksternal lingkungannya dapat ditelaah terhadap ASEAN Community sebagai objeknya. Perlu dipahami, dimensi *cluster of orientation* menaungi persepsi, nilai dan sikap yang dilatar belakangi sejarah utamanya dalam menjelaskan praktik hubungan internasional yang dilakukan oleh negara. Tinjauan terhadap konteks ASEAN Community, sudut pandang Indonesia dalam merespon kesepakatan dan kebijakan integrasi regional Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN sebetulnya secara lugas telah dijelaskan. Konteks sejarah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan para pembuat kebijakan baik pada masa lalu maupun kini mengenai sasaran dari kebijakan yang dibuat. Komitmen ASEAN dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan kawasan sejalan dengan nilai-nilai yang dianut Indonesia dalam politik internasional dan kebijakan luar negeri, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Andika, 2016; Drajat, 2018).

Dalam alinea ke-4 UUD 1945 berbunyi, “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sejalan dengan *core value* yang ditawarkan dalam integrasi ASEAN Community. APSC melihat signifikansi potensi dari kesatuan regional dalam harmonisasi kerja sama dan kolaborasi untuk selalu mewujudkan kehidupan negara anggota yang berjalan dengan damai, adil dan demokratis. Komitmen ASEAN dalam mitigasi dan resolusi konflik secara menyeluruh dan demokratis mencerminkan orientasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Hal ini sejalan dengan sila ke-3 Pancasila tentang persatuan serta sila ke-4 yang menekankan prinsip demokrasi. Selain itu, gagasan untuk terus mengupayakan kesejahteraan umum dan utamanya rakyat Indonesia juga terkorelasi dengan orientasi AEC melalui optimasi *single market* ASEAN, peningkatan daya saing ekonomi dan menekan disparitas masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila sila-5 yakni keadilan sosial. kebijakan luar negeri Indonesia dalam melihat ASEAN Community juga terlihat dari keselarasan tujuan ASCC untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

UUD 1945 dan Pancasila merupakan pedoman utama bagi Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, rancangan dan perencanaan kebijakan baik domestik maupun internasional harus selaras terhadap nilai terkandung pada kedua hukum tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia ditanamkan untuk mewujudkan cita-cita dari kedua pedoman tersebut. Kebijakan luar negeri yang dilaksanakan juga harus selaras dengan pedoman tersebut. Pertimbangan ini mendasari pemikiran para pembuat kebijakan terjadi secara lintas generasi dan pada kepemimpinan siapapun, termasuk juga era Jokowi.

Kebijakan luar negeri Jokowi pada periode pertama yang bersifat inward-looking dan menekankan “*pro-people diplomacy*” ternyata tidak mengurangi intensitas keterlibatan Indonesia dalam ASEAN.

Sebaliknya, Indonesia tetap berperan aktif dalam proses integrasi ASEAN Community. Dalam melihat hal tersebut, terminologi orientasi kebijakan luar negeri Jokowi yang dinilai kontras terhadap pemerintahan SBY yakni, “thousand friends –zero enemies” dan sangat menyambut realisasi ASEAN Community, tidak serta merta menempatkan urusan luar negeri Indonesia dalam lingkup marginal begitupun menyangkut ASEAN Selain itu, penilaian Jokowi atas urgensi jalinan hubungan luar negeri untuk mencapai kepentingan dalam negeri menjadi faktor pendorong lainnya dari pembuatan kebijakan luar negeri. *Pro-people diplomacy* lebih lanjut sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Retno mendasari komponen pengukuhan dan penjagaan kedaulatan, peningkatan perlindungan warga negara Indonesia, dan intensifikasi diplomasi ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan kompetitif selaras dengan orientasi pembentukan ASEAN Community melalui ketiga pilarnya.

### ***Set of Commitments To and Plan For Action: Sikap Indonesia terhadap ASEAN Community***

Analisis kebijakan luar negeri sebagai *Set of Commitments To and Plan For Action* merupakan tahapan berikutnya dalam mendefinisikan hubungan luar negeri yang dijalin oleh suatu negara dimana secara konkrit ditinjau lebih mendalam oleh para pembuat keputusan guna membina dan mempertahankan kondisi lingkungan eksternal dengan konsisten terhadap orientasi kebijakan luar negeri. Perlu dipahami, dimensi ini mencakup gambaran nyata dari reaksi negara dalam menyikapi kontestasi internasional termasuk menjawab peluang dan tantangan global.

Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia tidak hanya berkomitmen dalam pembentukan ASEAN Community, tetapi juga berupaya memperluas perannya dalam implementasi kebijakan ASEAN Community serta menjaga kesinambungan integrasi kawasan. Terlepas dari asumsi orientasi politik Jokowi yang tidak mengedepankan urusan luar negeri, pada praktiknya Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap posisi ASEAN. Hal ini sebagaimana dinyatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 2018 dalam acara annual international press conference (Anonymous, 2012) yaitu;

*“ASEAN continues to be a priority in Indonesia’s foreign policy in 2018 with the focus on strengthening ASEAN unity and centrality.”*

Pernyataan tersebut menguatkan tendensi dari hubungan luar negeri Indonesia dan ASEAN yang mengartikan dalam rancangan pembuatan kebijakan luar negeri, lingkaran konsentris sasaran Indonesia yang utama yaitu tetap ASEAN.

Ditambah lagi, pada tahun yang sama Indonesia menyambut hangat wacana pembentukan *Plan of Action* untuk mengimplementasikan *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* serta *ASEAN Extradition Treaty* (). Rencana pengajuan kedua konsensus dan komitmen Indonesia untuk menjaga sentralitas ASEAN tersebut dapat dipahami sebagai langkah implementasi pilar APSC yang juga sesuai dengan jargon “*pro-people diplomacy*” Jokowi dalam memenuhi kepentingan nasional Indonesia dalam lingkup politik dan keamanan. Dari dimensi ekonomi, negara-negara ASEAN memiliki satu pemahaman mengenai peranan fundamental energi dalam menjalankan roda perekonomian. Untuk melangsungkan pasar bebas Masyarakat ASEAN, jaminan terhadap keamanan energi setiap negara anggota menjadi pertimbangan tersendiri. Bagi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, jaminan atas suplai energi yang memadai bagi permintaan pasar domestik dan juga dapat berkontribusi pada pasar energi dunia merupakan suatu keharusan.

Penulis berpendapat atas dasar tersebut Indonesia banyak menjalin kerja sama dengan sejumlah *stakeholder* baik bersifat bilateral, regional dan multilateral dalam bidang ekspor impor energi. Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam ranah energi juga mendorong komitmen Indonesia

terhadap *The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation* (APAEC) yang terbagi ke dalam dua fase pertama di periode 2016-2020, dan kedua di periode 2021-2025. APAEC sendiri merupakan serangkaian dokumen kebijakan yang dirancang guna memfasilitasi kolaborasi energi regional. Karena itu, desain APAEC berfungsi sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan kolaborasi yang bertujuan untuk memajukan keamanan energi, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan dalam konteks ASEAN *Economic Community*. Dalam pilar ASCC, negara-negara ASEAN memberi perhatian khusus pada isu lingkungan, polusi, perubahan iklim, dan biodiversitas sebagai bagian dari komitmen bersama. Isu lingkungan ditekankan melalui dua karakteristik ASCC yakni *sustainability* dan *resilience*. Realita dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan negara anggota ASEAN termasuk kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan yang destruktif berdasarkan pengamatan telah semakin intens terjadi di kawasan ASEAN disamping ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan ekosistem hingga eksistensi ASEAN *Heritage Parks* (). Sejalan dengan orientasi lingkungan, kondisi dalam negeri Indonesia yang juga memprioritaskan isu lingkungan mendorong komitmen dan rencana aksi dalam tingkat regional ASEAN guna mengatasi permasalahan tersebut. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam *action plan* melalui ASEAN Working Group on Climate Change sebagai rekognisi dari ASEAN Vision 2025 dan ASEAN Strategic Plan on Environment (2016-2025).

Sejumlah komitmen dan action plan yang Indonesia tergabung di dalamnya untuk ASEAN Community termaktub dalam gagasan utama yakni ASEAN Community Vision 2025. Rumusan ini menandai *turning point* ASEAN dalam mewujudkan tujuan dari ketiga pilar AC dengan menekankan APSC Vision 2025, AEC Vision 2025, dan ASCC Vision 2025 yang selanjutnya diimplementasikan dalam wujud ASEAN *Blueprint* rentang periode 2016-2025 untuk mengevaluasi proses pembangunan dan optimasi ASEAN Community. Berdasarkan uraian dari sejumlah contoh komitmen Indonesia untuk visi dan rencana aksi dari ASEAN Community menjelaskan hubungan Indonesia terhadap ASEAN Community dijelaskan secara positif dari komponen komitmen dan rencana aksi dengan berdasarkan keselarasan orientasi dari kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi dengan orientasi ASEAN Community.

### ***Form of Behaviour : Peran Indonesia dalam ASEAN Community melalui Tiga Pilar ASEAN Political Security Community***

Indonesia berperan aktif dalam ASEAN Political Security Community karena sejalan dengan kepentingan nasionalnya dalam memperkuat integrasi ASEAN dan membangun identitas kolektif untuk menjaga stabilitas kawasan. APSC sendiri dimaksudkan bukan untuk menciptakan pakta pertahanan dan kebijakan luar negeri bersama, karena itu peran APSC dijalankan tetap pada landasan non-intervensi, ketahanan nasional dan regional serta penghormatan kedaulatan negara anggota. APSC dibentuk sebagai instrumen ASEAN untuk merespons dinamika politik dan keamanan, baik di tingkat regional maupun global.

Selaras dengan visi kebijakan luar negeri masa kepemimpinan Jokowi yakni berdaulat dalam politik, Indonesia turut andil dalam mengimplementasikan pilar ASEAN *Political Security*. Kontribusi penting Indonesia tersebut, termaktub dalam Cetak Biru ASEAN 2015 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura dengan tujuan mengintensifkan kerja sama politik dan keamanan masyarakat ASEAN. Cetak biru merupakan pergantian dari VAP 2004-2010 yang kemudian disahkan pada KTT ke-14 di Thailand dengan mengandung tiga karakteristik; “*A Rules-based Community of Shared Values and Norms, A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security, A Dynamic and Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World*” (APSC, 2009).

Dalam pilar politik dan keamanan ASEAN, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap demokrasi, HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberantasan perdagangan manusia

melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Di bawah administrasi Jokowi, pemerintah Indonesia turut menunjukkan kepentingan nasionalnya untuk melanjutkan kebijakan luar negeri dalam mempromosikan HAM dan demokrasi dalam forum multilateral ASEAN. Wujud nyata peran Indonesia di bidang HAM tercermin dari sikap Indonesia dalam merespon konflik Rakhine State tahun 2016. Hal ini membuka akses bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine, menyediakan berbagai inisiatif untuk mendukung rekonsiliasi nasional dan dialog *interfaith*, terlebih Indonesia juga mendorong Myanmar untuk memberikan informasi perkembangan terkini di Rakhine. Selain itu, dalam menyikapi isu konflik Laut China Selatan yang telah menjadi persoalan ASEAN, Indonesia berperan penting dengan menjadi *honest broker*—berupaya meredam ketegangan konflik tersebut melalui penyepakatan inovasi dua *interim AECsures* yakni *Joint Statement on the Application of CUES* dan *Hotline of Communications*. Lebih lanjut, Indonesia bertindak aktif dalam negosiasi *Code of Conduct* di Bali pada tahun 2017 (Drajat, 2018). Bergerak maju, negara-negara anggota ASEAN semakin memperkuat kerja sama di bidang maritim dalam *framework* konferensi internasional bertajuk *Resilience in the Age of Global Security di Manila, Filipina 2018* yang mengungkap peningkatan kerja sama negara anggota ASEAN di bidang keamanan yakni dari *cooperative security* menjadi *common security*. Inisiasi tersebut berkorelasi dengan orientasi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia, menempatkan urgensi kepentingan Indonesia yang dapat dicapai salah diantaranya melalui ASEAN. Disamping itu, guna mengukuhkan sentralitas ASEAN yang berorientasi pada pengamanan proses dialog dan kerja sama sebagai *driving force*, Indonesia juga telah berperan dalam memprakarsai diadakannya *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region* pada bulan Juli 2016 (Sari, 2019).

Selain permasalahan keamanan diatas, negara-negara ASEAN berkomitmen atas dasar kepentingan bersama dalam menangani kejahatan transnasional yang marak terjadi dalam konteks terorisme. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah insiden terorisme yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, diantaranya Bom Bali pada 2002, JW Marriott Hotel 2003 dan sejumlah bom di Filipina yang diduga terkoneksi dengan Jaringan jamaah Islamiyah di Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan demikian, Indonesia yang juga menjadi salah satu negara Asia Tenggara terdampak terorisme, mendorong penuh kerjasama penanggulangan *terorisme, radikalisme dan violent extremism* melalui implementasi dan ratifikasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism*. Pada persoalan perdagangan obat-obat terlarang, Indonesia sendiri juga menunjukkan keseriusannya untuk memperkuat kerja sama negara-negara ASEAN dengan menjadi 1<sup>st</sup> ASEAN Seaport Interdiction Task Force yang menghasilkan vocal point untuk isu *drug trafficking* (Drajat, 2018; Sari, 2019).

Disamping persoalan internal, wilayah geografis dari kawasan Asia Tenggara yang sangat potensial untuk menjadi perang pengaruh dari negara adikuasa mendorong negara anggota ASEAN untuk meningkatkan keamanan masing-masing. Dari konteks keamanan, melalui platform *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* atau ADMM +, Indonesia menunjukkan partisipasi aktif dalam mendukung perluasan kolaborasi dan kerja sama dalam bidang Keamanan Maritim, Kontra-Terorisme, Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, Operasi Pemeliharaan Perdamaian, Kedokteran Militer, Aksi Ranjau Kemanusiaan serta Keamanan Siber (Miknamara & Indra, 2024). Dengan menjadi tuan rumah untuk pergantian rutin ADMM, menjelaskan posisi tawar Indonesia dalam hal pertahanan maupun keamanan yang bertindak menjadi mediator ataupun fasilitator terkait diplomasi pertahanan negara-negara ASEAN untuk menjamin capaian dari kepentingan bersama dalam ADMM +.

### **ASEAN Economic Community**

Visi kebijakan luar negeri, Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinannya adalah terwujudnya Indonesia yang mampu berdiri di bawah kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi. Berdikari dalam hal ini sendiri merujuk kepada Indonesia diharapkan mampu memiliki fondasi perekonomian yang kuat

dan kokoh, serta tidak mudah goyah akibat bentuk ketergantungan ekonomi apapun dari pihak luar. Ini adalah bentuk kepentingan ekonomi nasional utama yang wajib mendapatkan prioritas.

Pada periode awal kepemimpinan Joko Widodo, kepentingan ekonomi nasional tersebut diarahkan selaras dengan tujuan peningkatan peran Indonesia yang mendalam di organisasi regional, yakni ASEAN. Karena itu, Jokowi berupaya aktif dalam memperkuat kerjasama dan menjamin sentralitas ASEAN. Ketegasan kebijakan luar negeri yang ditunjukkan oleh visi Presiden Joko Widodo tersebut, tidak jarang dianggap sebagai visi yang cenderung asertif, mengingat bagaimana tingkat kualitas kepercayaan diri terhadap pembangunan kapasitas ekonomi nasional dan regional melalui ASEAN (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2015).

Dari aspek ekonomi, Indonesia berperan penting dalam *ASEAN Economic Community*. Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri adalah realisasi integrasi ekonomi negara-negara ASEAN untuk menunjang sentralitas ASEAN. Ditargetkan terhadap pembentukan pasar tunggal atau *single market* dan unit utama dalam produksi, menjadi wilayah yang sangat kompetitif, dengan prinsip pengembangan ekonomi yang merata, dan terintegrasi penuh secara global (ASCC, n.d.). Kerangka masyarakat ini sendiri sebenarnya sudah disetujui pada tahun 2007 melalui naskah cetak biru (blueprint) yang disepakati pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-39. Dimana Indonesia juga berperan sebagai salah satu negara pemrakarsa. Namun, masyarakat ini baru dapat direalisasikan pada tahun 2015, yang mana Indonesia sudah berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Peran dan keterlibatan Indonesia dalam AEC sendiri dapat dikategorikan berdasarkan bidang-bidang dalam pilar AEC yang terdiri dari perdagangan, tenaga kerja, investasi, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau sering disingkat UMKM, dan lain-lain. Di bidang perdagangan barang dan jasa, Indonesia berperan aktif dalam merealisasikan tercapainya pengikisan biaya perdagangan hingga mencapai 10% pada 2020 serta melipatgandakan jumlah transaksi pada 2017. Hal tersebut berpengaruh sangat besar bagi para pengusaha dan pedagang di tingkat domestik maupun regional. Indonesia juga terus mendorong aktifnya negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan *ASEAN Single Window* yang berperan untuk sarana pertukaran teknologi informasi antara level nasional masing-masing negara, dengan negara ASEAN.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Indonesia juga berperan aktif dalam pergerakan tenaga kerja terampil dalam *Mutual Recognition Agreement (MRA)*, dimana hal tersebut ditujukan untuk memfasilitasi kemudahan perpindahan atau pasar tenaga kerja yang mampu bekerja secara terampil dan profesional dalam kawasan di seluruh ASEAN (Isnarti et al., 2021).

Dalam bidang kemitraan komprehensif, Indonesia juga berperan aktif sebagai tuan rumah dalam pertemuan terkait Kemitraan Regional Ekonomi Komprehensif atau *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ke-16 pada tahun 2016 dan ke-21 pada 2018. Kemitraan ini sendiri memiliki tujuan utama membawa pendekatan yang komprehensif atau menyeluruh terhadap bentuk-bentuk kerja sama strategis dalam lingkup regional ASEAN (Can & Hastiadi, 2021).

Dalam bidang pariwisata, Indonesia ikut berperan besar dalam meratifikasi *Agreement on the Establishment of the ASEAN Regional Secretariat on the Implementation of MRA TP* melalui (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat For The Implementation of The Asean Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean), 2017). Kerja sama ASEAN di bidang pariwisata sendiri diatur dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016 - 2025*. Dimana, ATSP membawa visi ASEAN sebagai destinasi tunggal, dengan jargon "One Community Towards Sustainability".

Dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Indonesia turut aktif sejak tahun 2016, lewat forum kerja sama Komite Koordinasi UMKM ASEAN. Forum ini berupaya menjadi

jembatan sinergi dan integrasi program kerja di ASEAN yang diharapkan mampu mendorong pengembangan UMKM masing-masing negara anggota ASEAN, dan melakukan pertemuan dua kali setiap tahunnya. Peran Indonesia dalam kerja sama ini tentunya sangat menguntungkan terutama bagi para pengusaha dalam negeri yang diharapkan mampu bersaing di pasar bebas ASEAN.

### ***ASEAN Socio-Cultural Community***

Dalam bidang sosio-kultural, Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga menjadi salah satu pemrakarsa dan menjadi salah satu negara yang merealisasikan Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN atau *ASEAN Socio-Cultural Community* pada 2015. Melalui masyarakat ini juga, Presiden Joko Widodo melaraskan dan mengekspresikan salah satu visi kebijakan luar negerinya, yakni “Berkepribadian yang Berbudaya”. Visi tersebut diharapkan mampu menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepribadiannya sebagai bangsa yang berbudaya dan memiliki sikap bela rasa yang sangat tinggi. Sikap bela rasa tersebut nantinya akan dibuktikan lewat cerminan sikap sosial masyarakat yang selalu saling menghargai, saling melengkapi, saling menguatkan, saling peduli satu sama lainnya. Sikap ini sendiri diharapkan mampu diwujudkan serta diimplementasikan tidak hanya secara nasional, namun juga diarahkan ke luar, yakni wilayah regional ASEAN.

Masyarakat Sosial Budaya ASEAN sendiri juga sebenarnya telah diprakarsai pada tahun 2009, dimana Indonesia juga menjadi salah satu negara pemrakarsanya. Namun, masyarakat ini juga baru dapat direalisasikan pada tahun 2015, yakni dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, dimana Indonesia saat itu sudah berada dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN ini sendiri ditujukan demi membangun kontribusi kolektif dalam memperkokoh integrasi ASEAN yang bertonggak pada masyarakat sebagai tumpuan utamanya (*people-centred*) dalam mempertanggung identifikasi kolektif, semangat kemitraan, semangat persaudaraan, dan rasa saling memiliki dan terikat (*We Feeling*) terhadap ASEAN (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Lebih lanjut, dapat diuraikan sebagai berikut.

Dalam aksi pembangunan manusia, Indonesia aktif dalam Organisasi Pemuda ASEAN atau *ASEAN Youth Organization*. Keterlibatan ini tidak terlepas dari kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas adalah kunci bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Pendidikan berkualitas mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik, modal sosial yang lebih berkualitas, masyarakat yang damai dan tercapainya kesetaraan gender, serta kesempatan kerja yang layak. Ini mempersiapkan sumber daya manusia ASEAN untuk menjadi tangguh, kompetitif dan siap menghadapi masa depan yang selalu berubah (ASEAN, 2020).

Dalam aksi Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, Indonesia turut berperan aktif dalam penyediaan layanan terintegrasi dan berfokus pada pelayanan sipil terhadap populasi penyandang disabilitas, mulai dari penyandang disabilitas anak-anak, penyandang disabilitas perempuan, dan penyandang disabilitas lanjut usia, dengan berbagai jenis disabilitas dan persyaratan dukungan. Sebab kondisi tersebut Kondisi ini seringkali menimbulkan marginalisasi dan pengucilan dari pelayanan, perlakuan yang adil dan informasi yang lengkap yang merupakan manifestasi dari diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, Indonesia aktif dalam ASEAN Enabling Masterplan 2025 yang memiliki perhatian pada pengarusutamaan Hak bagi Penyandang Disabilitas yang diusung pada 2018 yang lalu.

Dalam aksi Pengupayaan Hak-hak dan Keadilan Sosial, Indonesia juga aktif dan terlibat dalam menyetujui dibentuknya Rencana Aksi Regional terkait Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. Sedangkan terkait isu kesetaraan gender, Indonesia terlibat juga dalam Pengarusutamaan Gender Jalur Cepat ASEAN Melalui Pendekatan Menyeluruh pada 2022 ini. Ini tidak terlepas dari jumlah populasi yang sedikit lebih dari setengah populasi di ASEAN dan kemajuan signifikan telah dibuat untuk perempuan dan anak perempuan di kawasan ini terutama dalam hal akses ke pendidikan, partisipasi dalam angkatan kerja, peningkatan kualitas atau kesehatan reproduksi dan perluasan ruang

untuk mengekspresikan suara mereka dan melatih kemampuan mereka. agen. Namun, masih banyak tantangan yang menghambat realisasi potensi penuh perempuan dan anak perempuan. Remaja putri dan remaja putri di kawasan ini terus menghadapi tantangan seperti berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi termasuk pernikahan anak, usia dini dan paksa, akses terbatas untuk mendapatkan dukungan seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi, dan akses ke peluang. Ketika perempuan memasuki angkatan kerja, kebanyakan dari mereka berada di sektor informal dengan akses yang minim terhadap perlindungan sosial. Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di industri garmen dan tekstil, serta pariwisata dan industri kreatif, yang cenderung memperkuat stereotip gender. Baik di sektor formal maupun informal, perempuan berpenghasilan lebih rendah daripada rekan laki-laki mereka, dan mereka yang berada di sektor korporasi memiliki kesempatan terbatas untuk memecahkan kaca langit-langit dan menduduki posisi manajemen senior. Di seluruh sektor formal dan informal, dan kontinum perkotaan dan pedesaan, perempuan di wilayah tersebut terus memerangi kekerasan dan diskriminasi, untuk mengadvokasi pengakuan, redistribusi dan remunerasi untuk perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga, dan mewujudkan hak-hak mereka terhadap kesetaraan gender.

Dalam aksi Membangun Identitas ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam mengembangkan Arsip Digital Warisan Budaya ASEAN atau *ASEAN Cultural Heritage Digital Archive (ACHDA)* yang merupakan wadah dalam mewariskan dan mengenalkan budaya-budaya masing-masing negara anggota ASEAN, yang merupakan kawasan negara dengan kekayaan budaya yang sangat besar dan megah. Tidak jarang juga, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam kegiatan-kegiatan budaya di tingkat ASEAN.

Dalam aksi Memastikan Pembangunan Berkelanjutan dan Mempersempit Kesenjangan Pembangunan, Indonesia terlibat secara langsung dalam mempromosikan pendekatan multi-level secara terpadu untuk memberantas kemiskinan yang merupakan bagian dari Visi Masyarakat ASEAN pada 2025 nanti. Indonesia sendiri juga siap melakukan pengembangan kapasitas dan platform untuk pengetahuan dan pertukaran telah dibentuk untuk memfasilitasi dialog di antara berbagai pemangku kepentingan untuk memberantas kemiskinan dan mempromosikan pembangunan pedesaan. Presiden Joko Widodo juga menyadari bahwa Dalam dua dekade terakhir, ASEAN telah mengalami penurunan kemiskinan yang stabil, dari 47% pada tahun 1990 menjadi 15% pada tahun 2015. Namun, hal itu terus berlanjut terutama di daerah pedesaan di kawasan ini . Kemiskinan lebih dari sekadar kurangnya pendapatan. Hal ini diwujudkan melalui ketidakmampuan untuk membeli dan mengakses kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Orang miskin menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka kehilangan umur panjang dan hidup sehat, dan menyadari potensi penuh mereka. Berbagai bentuk deprivasi telah dialami oleh banyak orang di wilayah ini terutama yang miskin dan rentan. Diperparah oleh risiko dan guncangan yang berulang, baik yang ditimbulkan akibat ulah manusia ataupun yang ditimbulkan akibat bencana alam, mereka cenderung jatuh kembali ke kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga didorong dan diperkuat oleh ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dan dengan demikian mempengaruhi perempuan dan anak perempuan secara berbeda dari laki-laki dan anak laki-laki. Disisi lain, dalam mencapai tujuan tersebut, kawasan ini berada di lintasan yang jitu dalam mencapai target pendidikan berkualitas (SDG 4) dan industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9). Kemajuan yang baik dicapai dalam mencapai nol kelaparan (SDG 2) dan kesehatan dan kesejahteraan yang baik (SDG 3) . Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan (SDG 10), aksi iklim (SDG 13), dan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (SDG 16).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan temuan dan analisis riset yang telah dijelaskan, dapat dipahami konsepsi hubungan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN Community pada era kepemimpinan Jokowi pertama berjalan dan bersifat positif. Pada implementasinya, berbagai peran dan kontribusi Indonesia dalam melangsungkan ASEAN Community telah dilandasi komitmen kuat dan nyata serta perencanaan matang juga terstruktur dalam kesepakatan bersama negara anggota ASEAN yang juga hal tersebut selaras terhadap gagasan pemerintahan Jokowi dengan karakteristik, *pro-people diplomacy* dengan tetap menjadikan ASEAN sebagai *cornerstone* dan lingkaran konsentris utama kebijakan luar negeri Indonesia. Temuan tersebut dijelaskan melalui implementasi tiga pilar ASEAN Community yakni *ASEAN Political-Security Community*, *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Socio-Cultural Community*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, A., Rizki, G., Putra, A., Nur, \*, & Yunus, R. (2024). Indonesian Foreign Policy In Maintaining Multilateral Relations of ASEAN Members. *ADALAH*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/ADALAH.V7I1.38886>
- Andika, M.,T. (2016). THE ROLE OF INDONESIA IN ASEAN UNDER JOKOWI'S PRO-PEOPLE DIPLOMACY. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOPAC*
- Andis Rafaldhanis, M. R. (2023). ASEAN sebagai Lingkaran Konsentris Pertama Indonesia. *Jurnal Alternatif - Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1). <https://doi.org/10.31479/jualter.v14i1.54>
- Anonymous. (January 10, 2018). ASEAN – priority in Indonesia's foreign policy in 2018. Retrieved from People's Army Newspaper <https://en.qdnd.vn/asean-community/asean-news/asean-priority-in-indonesia-s-foreign-policy-in-2018-488696>
- Artner, A. (2017). ROLE OF INDONESIA IN THE EVOLUTION OF ASEAN. *The Journal of East Asian Affairs*, 31(1), 1–38.
- ASCC. (n.d.). *ASEAN Socio Cultural Community - ASEAN Main Portal*. ASEAN. Retrieved October 17, 2024, from <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community#culture>
- ASEAN. (n/d). *ASEAN 2025: Forging Ahead Together*. Retrieved from <https://www.google.com/url?q=https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjzmMnq4o6LAXWkzjgGHRerINAQFnoECAoQAg&usg=AOvVaw1Tugct0FtmJcGZwWFXjbbS>
- ASEAN. (May 9, 2012). *Speech H.E. Dr Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia, at the Opening Ceremony of the 19th ASEAN Summit*. Retrieved from <https://asean.org/speech-h-e-dr-susilo-bambang-yudhoyono-president-of-the-republic-of-indonesia-at-the-opening-ceremony-of-the-19th-asean-summit/>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2015). *Background Studi Penyusunan RPJMN III 2015-2019*. Direktorat Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Cahya, D. D., Mamahit, D. A., Yusnaldi, Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Panji, S. (2023). Indonesia's Role in Realizing the Vision of the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.507>
- Can, E., & Hastiadi, F. F. (2021). RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 79–92. <https://doi.org/10.22212/jekp.v11i2.1745>
- Drajat, G. M. (2018). Assessing Indonesia's Leadership in the Advancement of ASEAN Political-Security Community under President Joko Widodo. *AEGIS: Journal of International Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.33021/aegis.v2i2.424>
- The Habibie Centre. (2016). ASEAN Community, Quo Vadis?. *The Habibie Center ASEAN Studies Program ASEAN BRIEFS*. 3(3)
- Isnarti, R., Dwi Astuti, W. R., & Irawan, P. (2021). Analisa Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemberlakuan Mutual Recognition Agreement (MRA) di Negara-Negara Anggota ASEAN. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 4(2), 82–95. <https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.3010>

- Kominfo. (2023, July 11). *Menlu Retno: Kawasan Asia Tenggara Harus Tetap Bebas dari Senjata Nuklir - ASEAN Indonesia 2023*. ASEAN INDONESIA. <https://asean2023.id/id/news/foreign-minister-retno-southeast-asian-region-must-remain-free-of-nuclear-weapons>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations* (N. Aguilera, Ed.; 1st ed.). SAGE.
- Mahadana, S. J. (2023). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi: Perkembangan, Prioritas, Dan Tantangan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(10), 2045–2058. <https://doi.org/10.46799/ADV.V1I10.143>
- Miknamara, J. S. Koloay., & Indra, I. (2024). Peran Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kawasan Regional Asean di Tengah Perebutan Pengaruh Negara-Negara Great Power. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3741–3751. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1528>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat For The Implementation of The Asean Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (Persetujuan Tentang Pembentukan Sekretariat Regional Untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean), Pub. L. No. 61, Pemerintah Pusat RI (2017).
- Quayle, L (2017): Indonesia, the ASEAN Socio-Cultural Community, and the contingent profile of regional ‘great-power management’, *The Pacific Review*, DOI:10.1080/09512748.2017.1327450
- Rafaldhanis, M.,R.,A. (2023). ASEAN sebagai Lingkaran Konsentris Pertama Indonesia. *Jurnal Alternatif : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1). <https://doi.org/10.31479/jualter.v14i1.54>
- Roberts, C. B., & Widyaningsih, E. (2015). Indonesian Leadership in ASEAN: Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy. In *Indonesia’s Ascent* (pp. 264–286). Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/9781137397416\\_13](https://doi.org/10.1057/9781137397416_13)
- Rosenau, James N., “The Study of Foreign Policy,” in James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson, Gavin Boyd (eds.), *World Politics: An Introduction*, (New York: Free Press,1976).
- Rosyidin, M & Kusumawardhana, I. (2022). Participate for Profit: Bilateral-Multilateral Nexus in Indonesian Foreign Policy in the Era Joko Widodo (2014-2019). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* , 7(1), 11-35
- Sari, S. (2019). PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY. *Jurnal Dinamika Global*, 4(01), 24–65. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.100>
- Situmorang, Mangadar. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, vol. 11, no. 1, 2015, doi:10.26593/jihi.v11i1.1442.%p.
- Syarip, R. (2020). Defending Foreign Policy at Home: Indonesia and the ASEAN-Based Free Trade Agreements. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 405-427. <https://doi.org/10.1177/1868103420935556>
- Velasco, J. C. (2023). Southeast Asian regionalism: An examination of the progress and priorities of ASEAN through its joint communiqués. *Journal of ASEAN Studies*, 11(2), 245–265. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i2.9402>
- Weiss, C. (2015). How Do Science and Technology Affect International Affairs? *Minerva*, 53(4), 411–430. <https://doi.org/10.1007/s11024-015-9286-1>